SURAT KABAR MAHASISWA Edisi 64, Rabu 12 Mei 2004

BALKON

BALAIRUNG KORAN

BALKON EDISI 64 :

Berteriak di tengah keramaian : Aksi yang diadakan oleh Mahasiswa Peduli UGM (MP UGM) tenggelam di tengah hiruk pikuk kegiatan di hari terakhir penyerahan formulir pendaftaran UM-UGM (abieb/bal)

Gerakan Yang Berserak

Aksi mahasiswa memang tak pernah mati. Pun, aksi mereka dalam menyikapi isu pendidikan. Sejumlah elemen mahasiswa, silih berganti, terus menyatakan sikap mereka. Berbagai aksi terus dilakukan, meski insidental dan sporadis.

Walau tak lagi semarak, gerakan mahasiswa dalam menanggapi isu pendidikan terus bergulir. Berbagai elemen mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus, secara beriringan, memperlihatkan sikap mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat. Isu besar yang diusung dalam aksi-aksi mereka umumnya sama. Yaitu penolakan terhadap tingginya biaya pendidikan di UGM, serta kebijakan-kebijakan lain yang dianggap tidak memihak mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) MIPA, misalnya. Dalam aksinya beberapa waktu yang lalu, BEM MIPA mencoba mengkritisi kebijakan penyelenggaraan Ujian Masuk (UM-UGM). Mereka melihat ada banyak kejanggalan dalan pelaksanaan UM-UGM tahun ini. Selain kejanggalan soal tingginya biaya, mereka juga menyoroti sistem penyelenggaraan ujian yang cenderung sentralistik. Sistem yang demikian dinilai telah membatasi kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan di UGM. Budi Santosa, presiden BEM MIPA, mengatakan bahwa mereka juga menuntut adanya evaluasi dari pihak rektorat terhadap pelaksanaan UM-UGM tahun sebelumnya.

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (LEM-FTP) mencoba menawarkan tema yang berbeda. Renta, Presiden LEM-TP, mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak kebijakan biaya pendidikan yang mahal, selama itu dilakukan demi meningkatkan mutu UGM. "Tetapi biaya

bersambung ke hal 3

kontak pembaca

Mahasiswa hukum, jangan percaya kata-kata rektorat. Tuntut lagi hakmu, jangan melempem!
Cah_hukum@telkom.net

Segenap awak BPPM Balairung UGM Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-4 Bulaksumur Pos
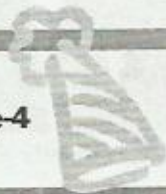
festival

Portal UGM Memakan Korban

Belum setahun pembatas jalan (portal) di Bunderan UGM dipasang telah merenggut korban jiwa. Kamis malam lalu, 06 Mei 2004, Wahyu Wihadmadji menabrak portal. Wahyu dike..al sebagai Anggota Unit Kesenatan Mahasiswa (Ukesma) dan Unit Selam (unyil) UGM.

Kejadian bermula dari niat baik Wahyu untuk membetulkan kerusakan motor temannya. Wahyu dikenal penghobi otomotif sehingga sedikit banyak tahu seluk-beluk motor. Sekira jam 11 malam, bersama seorang teman, motor Yamaha F1ZR milik Ani Sulistiani itu kemudian digelandang ke Boulevard untuk "diservis". Setelah mengutak-atik motor, Mahasiswa Filsafat UGM angkatan '97 ini kemudian melarikan motornya dari ujung utara Boulevard dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Priyo Budiasmoko menyertai. Sesampainya di ujung selatan, Wahyu tak membelokkan motornya sebagaimana dilakukan Priyo. Dan nahas, Wahyu telat menginjak pedal rem. Tubuh dan motor pemuda asal Bantul ini membentur portal yang melintangi jalan. Portal itu pun terdorong keras hingga penampang gembok terlepas dari tempatnya. Wahyu jatuh membentur aspal.

Ditemani Priyo,Wahyu dibawa ke RSU Panti Rapih. Di sana, ia mendapat pertolongan pertama. Menurut cerita Dwi Arifman, Ketua UKESMA, saat itu Wahyu masih sadar, bahkan masih enak diajak ngobrol. Hasil diagnosa menyebutkan, luka yang dialami wahyu antara lain luka di bagian wajah dan lengan. Tak ada tanda-tanda luka serius di tubuh Wahyu.

Tetapi keesokan harinya, anak kedua dari tiga bersaudara ini dikabarkan meninggal. Seperti diutarakan Parjo, anggota Ukesma yang menemani wahyu di Panti Rapih. "Waktu dirawat di sana, dia (Wahyu-Red.) masih sadar, keadaannya juga bagus, kok besoknya sudah nggak ada. Saya awalnya tak percaya," tuturnya mengenang. Tetapi Dwi sempat mendengar cerita dari keluarga Wahyu, sebelum meninggal, Wahyu mengeluh perutnya sakit.

Untuk tak mengulang musibah serupa, R. Deda Suwandi. SMIK, SE, Kepala Satuan Keamanan Kampus (SKK) UGM akan mengevaluasi pembatas jalan yang biasa digunakan oleh SKK selama ini. "Harusnya pembatas jalan seperti itu (portal-Red.) memiliki spotlight hitam-putih, sehingga dari jauh sudah tampak ada pembatas jalan," tuturnya. Ia juga menambahkan, hendaknya kita menggunakan fasilitas kampus UGM dengan sebaik-baiknya, "bukan untuk trek-trekan atau latihan menyetir kendaraan," katanya.[]

Luki

BALKON

DITERBITKAN OLEH **BPPM UGM BALAIRUNG Penanggungjawab:** Indi Aunullah **Koordinator:** Lukman **Tim Kreatif:** Idha, Abib, Indra **Editor:** Bambang, Iqbal, Asep, Gilang, Elis, Poet **Redaksi:** Ghozi, Angga, Nurdin, Izzah, Dinar, Arif, Ryan, Anthony, Erina, Ardi, Nana, Puji **Risdok:** Heru, Reza, Rusman **Perusahaan:** Alfi, Lizwan, Dian, Agung **Produksi:** Satya, Husni

ALAMAT REDAKSI DAN SIRKULASI: BULAKSUMUR B-21 YOGYAKARTA 55281, TELEPON:(0274) 901077, FAX:(0274)566171, **E-MAIL: BALKON.UGM@EUDORAMAIL.COM,** REKENING BCA YOGYAKARTA NO.0372072120 A.N WIDHI BUDIARTATI +++ GRATIS DI: UPT I, UPT II, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, MASJID KAMPUS, BONBIN SASTRA, GELANGGANG MAHASISWA, WARTEL KOPMA, PARKIR TP, KAFETARIA KOPMA, FASNET TEKNIK, KPTU TEKNIK, WARNET EKONOMI, PLAZA FISIPOL, KANTIN BIOLOGI, KANTIN PETERNAKAN, KANTIN FILSAFAT, FAKULTAS-FAKULTAS LAIN, DAN BULAKSUMUR B-21

Redaksi menerima tanggapan, pesan, kritik, maupun saran pembaca sekalian yang berkaitan dengan lingkungan UGM melalui alamat E-Mail: balkon_ugm@eudoramail.com atau SMS ke 08170418077 atau juga dapat langsung disampaikan kepada awak balairung di Bulaksumur B-21.

pendidikan yang mahal tersebut wajib disubsidi oleh negara dan harus ada transparansi dalam pengelolaannya," tambahnya buru-buru. Dalam melancarkan aksinya, mereka memulai dengan melakukan penyadaran pada mahasiswa tentang permasalahan yang diangkat. Menurutnya hal ini dirasa penting karena mahasiswa TP menginginkan kejelasan isu. "Ketidakjelasan isu inilah yang menyebabkan mahasiswa malas untuk melakukan aksi," ujarnya.

Selain aksi sporadis dari tiap fakultas, beberapa elemen mahasiswa juga melakukan penyikapan bersama lewat aliansi. Mahasiswa Peduli (MP UGM) yang merupakan aliansi dari beberapa elemen intra dan ekstra kampus, juga mengusung isu yang sama dalam aksi-aksinyanya. Yaitu menolak tingginya biaya pendidikan, terutama di UGM. Januar Pribadi, wakil koordinator MP, menambahkan bahwa aksi yang dilakukan MP tidak hanya dengan demonstrasi. Mereka juga mengadakan diskusi rutin soal biaya pendidikan. "Selain itu kami juga menjajagi gugatan secara hukum terhadap pihak rektorat UGM. Menurut kami, peraturan yang dikeluarkan UGM itu cacat hukum," ujarnya.

Selain elemen intra kampus, organ ekstra kampus juga tidak ketinggalan dalam merespon permasalahan tersebut. Mereka menggagas terbentuknya wadah perjuangan bersama yang diberi nama Aliansi Peduli Kampus Rakyat (APKR). Formasi taktis ini, juga merupakan kesatuan antara elemen ekstra dan intra. APKR bermula dari Poros Boulevard, yaitu aliansi yang dibangun oleh elemen-elemen mahasiswa ekstra seperti HMI MPO, PMII, FMN, GMNI,GMKI, serta KM-UGM yang dianggap sebagai representasi organ intra kampus.

Koordinator Lapangan (Korlap) APKR, Ahmad Sofyan, menjelaskan bahwa agenda yang dibawa adalah penguatan basis pergerakan dengan membuat jaringan yang luas. Yaitu jaringan dengan dosen-dosen serta LSM yang dinilai peduli pada isu pendidikan. Selain itu mereka juga konsern untuk melakukan sosialisasi isu yang mereka usung.

Namun di tengah perjalanannya, wadah aliansi ini didera problem internal. Perbedaan pemikiran menyulut mundurnya dua organ mahasiswa yang turut serta di dalamnya. Yaitu FMN dan KM-UGM. Presiden KM-UGM, Yudi Eka Prasetya, mengatakan bahwa KM mundur dari alansi tersebut karena belum adanya komunikasi lebih lanjut dengan elemen intra kampus perihal keterlibatan mereka dalam wadah itu. Akibatnya mereka belum menemukan titik temu dalam menentukan posisi KM dalam APKR. "Namun kami tetap menjalin komunikasi dengan pihak APKR," lanjut Yudi diplomatis.

Yudi menambahkan bahwa pengunduran diri mereka juga disebabkan oleh waktu yang tidak tepat. Akan tetapi pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Ahmad Sofyan. Menurutnya, pengunduran diri organisasi ini (KM-*Red.*)bernuansa politis. Yakni terkait dengan persiapan mereka dalam menyambut Pemilu Mahasiswa Raya (PEMIRA). Masih menurut Sofyan, KM-UGM ingin berkonsentrasi pada agenda tersebut.

Tak cuma soal kesibukkan internal lembaga, keterlibatan dengan aliansi lain juga bisa jadi pemicu rapuhnya suatu aliansi. Kasus Front Mahasiswa Nasional (FMN) bisa diambil sebagai contoh. Edi Kurniawan selaku koordinator FMN UGM, menjelaskan bahwa pengunduran organisasinya dari APKR dikarenakan FMN sudah terlanjur terikat kuat dengan aliansi mahasiswa lainnya, yaitu MP UGM.

Dalam menanggapi keluarnya dua elemen tersebut, Rofi'ah, salah satu aktivis APKR, mengatakan bahwa APKR tetap akan melebarkan sayapnya. APKR akan membuka pintu yang seluas-luasnya bagi seluruh elemen mahasiswa di UGM, baik intra maupun ekstra, untuk bergabung. "Bahkan kami juga akan terus mencoba melakukan penjajakan dengan elemen mahasiswa dari universitas yang lain. Kami juga mencoba untuk memperluas wacana pendidikan yang murah ke beberapa LSM," tandas Rofi'ah mantap.

Berbagai aksi yang dilakukan memang cenderung sporadis. Hingga saat ini, belum ada indikasi nyata dari berbagai elemen tersebut untuk kembali membentuk aliansi bersama. Setidaknya, hal tersebut bisa dilihat dari keputusan masing-masing elemen dalam melakukan penyikapan. Kesan yang muncul, kemudian, adalah ketidaksamaan sikap mahasiswa dalam menyikapi suatu isu. Fenomena tersebut sangat disayangkan oleh Kandar, Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fak Kehutanan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antar elemen mahasiswa. Kesamaan isu yang diusung berbagai elemen mahasiswa tidak bisa dengan mudah menyatukan mereka untuk melakukan penyikapan bersama. Ternyata sindrom koalisi tidak hanya terjadi dalam panggung politik elit.[]

Angga | Gozy | Nurdin

Kelompok mahasiswa	Frekuensi aksi*	Isu yang diangkat
APKR (Aliansi peduli kampus rakyat)	2	Biaya pendidikan yang mahal
BEM MIPA	1	Kebijakan UM UGM yang sentralistik
MP UGM (Mahasiswa Peduli UGM)	1	Pendidikan yang mahal
LEM Fak. TP	2	Transparansi pengelolaan biaya pendidikan di UGM
LEM Fak. Kehutanan	2	Sistem pendidikan di UGM
DEMA Fak. Ekonomi	3	Kebijakan UM UGM dan biaya pendidikan di UGM
BEM Fak. Teknik	6	Kebijakan UM UGM dan kebijakan SKS
KM UGM (Keluarga Mahasiswa UGM)	5	Kebijakan SKS variabel

*Aksi-aksi yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa di UGM sepanjang Januari-Mei 2004.

Bersatu untuk Berpisah

Seperti bunyi iklan, selalu ada yang baru dari kebijakan rektorat. Apa lagi kalau bukan kenaikan biaya pendidikan saban tahun. Begitu pula dengan penyikapan mahasiswa. Sayang, egoisme gerakan kerap membumbui penyikapan tersebut.

Tidak mudah memang memadukan sentimen kebersamaan untuk menyikapi kenaikan biaya pendidikan. Di UGM misalnya, perpecahan di kalangan gerakan mahasiswa menjadi suatu yang lumrah dan berulang setiap tahun. Beberapa aliansi berulangkali dibentuk untuk melawan kebijakan kampus yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa.

Kekuatan bersama dengan jumlah mahasiswa yang sampai ribuan tidak mampu dikelola untuk memperkukuh kekuatan mahasiswa. Tapi jangan kata mau mengorganisir, pecah dan bubar adalah lakon lama dari aliansi yang dibentuk mahasiswa.

Isu pendidikan agaknya telah menjadi persoalan bersama yang tak surut disuarakan. Hingga muncullah inisiatif antara organisasi intra (KM-UGM) maupun ekstra kampus semacam kelompok diskusi, elemen pergerakan maupun dengan lembaga penerbitan mahasiswa untuk membentuk aliansi bersama. Semenjak tahun1999 penolakan terhadap PP No 61 th. 1999 yang mendasari 28 elemen mahasiswa di kampus ini bersepakat melahirkan Komite Aksi Pendidikan Kerakyatan, biasa disingkat Komite APIK.

Komite ini lahir untuk menolak Otonomi Kampus versi rektorat yang berarti otomi pembiayaan. Alasan yang paling mengemuka waktu itu adalah komite ini untuk mewadahi beragamnya kepentingan mahasiswa. Komite hadir dengan mengusung isu yang lebih konkret yaitu pendidikan murah yang bisa dijangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena bukan rahasia lagi apabila otonomi kampus memiliki konsekuensi terhadap mahalnya pendidikan. Sayangnya, gerakan ini hanya bergaung di wilayah kampus dengan kinerja yang tertatih-tatih menghadapi kenyataan berguguranya elemen yang tergabung dalam komite ini. Hingga akhirnya perlahan Komite APIK surut, memudar dan untuk kemudian hilang.

Persoalan pendidikan terutama soal otonomi kampus terus berlanjut. Belum selesai kontroversi PP No. 61 th. 1999 kemudian disusul PP No 153 th. 2000. UGM sebagai Badan Hukum Milik Negara dijelaskan lebih gamblang. Termasuk diantaranya ihwal penetapan Majelis Wali Amanat (MWA) sebagai keterwakilan pemerintah, masyarakat dan universitas. Disebutkan bahwa dua dari 25 anggota MWA diisi oleh mahasiswa.

Di kalangan mahasiswa mulai muncul perdebatan menyangkut keterwakilan mahasiswa di MWA. Akan tetapi ditengah-tengah perdebatan tersebut KM-UGM tanpa sepengetahuan elemen lain mendaftarkan Presiden BEM KM Rahman Toha dan Sekjennya Rudi Hantoro untuk duduk di MWA. Tentu saja hal ini semakin menambah panjang polemik di kalangan mahasiswa. Sebagian gerakan menganggap bahwa MWA merupakan organ bentukan PP No. 153 th. 2000 yang sejak awal tidak disepakati keberadaannya. Pergerakan mahasiswa yang dibentuk bersama menjadi tidak padu karena tidak adanya kesepahaman dalam menyikapi otonomi perguruan tinggi tersebut.

Maka mahasiswa yang menunjukkan sikap resisten terhadap penyikapan KM-UGM membentuk Mahasiswa Peduli UGM yang acap disebut MP. Organisasi ini dibentuk untuk menandingi penyikapan KM-UGM terhadap otonomi pendidikan yang dirasa tidak mematuhi komitmen awal yang telah mereka buat. Hal ini tidak dibantah oleh Fauzan, salah seorang pendiri MP, ketika ditanya alasan pembentukan MP, " MP dibentuk sebagai organ tandingan BEM-KM yang telah mengkhianati komitmen awal terhadap penyikapan otonomi kampus." Namun KM-UGM menandai pembentukan MP lebih dikarenakan perbedaan pandangan terhadap analisis ide-ide pergerakan. "Pandangan kita berbeda mengenai bagaimana cara melakukan pendekatan dengan rektorat," ungkap Salman Nasution Sekjen KM UGM.

Aksi pergerakan pendidikan	Waktu	Isu yang diangkat
Komite APIK	November 1999 - April 2000	Kemunculan PP no. 61 tahun 1999 tentang otonomi kampus
MP UGM	Januari - Maret 2002 *	MWA, Suksesi Rektor, dan PP no 153 tahun 2000 tentang pem - BHMN - an UGM
FPKR	Agustus - September 2002	SK Rektor UGM no. 109/P/PD/2002 tentang biaya operasional (BOP)
KM-UGM	September 2002*	SK Rektor UGM no. 109/P/PD/2002 tentang biaya operasional (BOP)
MM-UGM	September 2002*	SK Rektor UGM no. 109/P/PD/2002 tentang biaya operasional (BOP)
APKR	April 2004	Pemberlakuan sistem SKS

Perbedaan cara penyikapan

terhadap rektorat inilah yang kemudian menjadi soal pelik. Contoh mencolok bisa dibuktikan dari berbagai respon masing-masing elemen. Resistensi MP terhadap keabsahan PP No. 153 th. 2000 dan keberadan MWA sedangkan KM-UGM malah sibuk menyelenggarakan referendum tentang setuju/tidak keterwakilan mahasiswa di MWA dan bagaimana PP No 153 th. 2000 bisa diamandemen.

Penentangan atas tindakan KM itu bermunculan. "Sekali tidak, tetap tidak untuk otonomi kampus," sergah Fauzan, mahasiswa asal Aceh itu. Bagi MP tidak ada kata kompromi dan tawar menawar, "Kebutuhan akan pendidikan yang terjangkau bagi sebagian besar rakyat sudah tidak bisa ditawar lagi." imbuhnya Fauzan bersemangat.

Akan tetapi KM menyikapinya dengan usaha lain. Cara-cara dialogis tawar-manawar dengan rektorat terus-menerus dilakukan. Penyikapan terhadap rektorat pun lebih lunak. Namun konsekuensi dari perbedaan sikap ini kemudian menjadi kericuhan terhadap perjuangan mahasiswa. KM dan MP pun menjadi susah untuk disatukan. Apalagi dalam satu aliansi.

Walapun begitu, bukan berarti keduanya tidak pernah mencoba bertemu dalam aliansi bersama. Masih ditahun yang sama, 2002, keduanya membentuk Forum Peduli Kampus Rakyat bersama pelbagai elemen mahasiswa lain. Rencana mengenai kepentingan yang lebih luas dibahas secara lebih matang. Landasan pergerakan yang mereka usung adalah pencabutan SK Rektor No. 109/P/PD/2002 tentang pemberlakuan BOP. Celakanya, ditengah perjuangan, FPKR mulai terlihat adanya ketidaksepahaman akan penyikapan terhadap rektorat. Ada pihak yang bersikap kompromi dan di pihak lain non kompromi. Cerita berikutnya bisa ditebak, FPKR terpecah menjadi dua.

Klimaks dari perpecahan itu berujung pada aksi yang berlangsung pada 7 September 2002. Kala itu KM UGM dengan sebagian massa mahasiswa baru yang berhasil dihimpun melakukan aksi di selatan Gedung Pusat UGM. Sementara, pecahan FPKR lainnya yang kali ini tampil dengan nama Maklumat Mahasiswa (MM) UGM berada di sebelah utara Gedung Pusat. Perbedaan sikap ini seringkali menjadi persoalan dari waktu ke waktu.

Otonomi kampus agaknya tak selesai melahirkan turunan-turunan yang kontroversional. Pemberlakuan SKS variabel menjadi isu yang jadi perkara lagi. Pergerakan terpecah menjadi faksi-faksi yang tidak jelas. Pembentukan Aliansi Peduli Kampus Rakyat kenyataannya tidak bisa mewadahi kepentingan semua elemen.

Sentimen sejarah bermain di sana, MP dengan tegas menolak masuk dalam keanggotaan APKR. Seperti diungkap oleh Fauzan lagi, " MP tidak masuk APKR karena ada KM di sana. Apabila kawan tidak menjadi bagian dari solusi maka kawan akan jadi masalah itu sendiri." Pergerakan bergerak sendiri-sendiri, berteriak serak menghadapi rektorat yang semakin percaya diri.[]

Izzah, Dinar

Efektivitas Gerakan Mahasiswa Mengkritisi Kebijakan Kampus

Mustafid : Mungkin Kelemahannya Pada Metode Gerakan

Kebijakan kampus -seperti kenaikan biaya pendidikan- menjadi perhatian gerakan mahasiswa. Bermacam cara dilakukan oleh gerakan mahasiswa untuk menggugat kebijakan itu, namun ternyata tak membuahkan hasil. Di manakah letak kekurangan upaya yang telah dilakukan? Wawancara Balkon dengan Muhammad Mustafid, mantan aktivis gerakan mahasiswa PMII dan mantan ketua PMII cabang Sleman, mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Di manakah arti penting gerakan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan kampus?

Gerakan mahasiswa berusaha membangun kesadaran politik para mahasiswa. Selain itu, gerakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan kampus itu menunjukan bahwa mahasiswa juga terlibat dalam lingkungan mereka. Kampus adalah wilayah paling dekat, wilayah kesejarahan mereka, medan sosial, medan politik mereka. Jadi tidak aneh jika mahasiswa mengadvokasi persoalan-persoalan pendidikan, seperti kenaikan biaya pendidikan.

Adakah kekurangan yang terdapat pada gerakan mahasiswa?

Dari segi isu, misalnya "anti komersialisasi", saya pikir sudah tepat dan bisa dipahami oleh banyak orang. Mungkin kelemahannya pada metode gerakan. Selama ini kekurangan metode gerakan itu adalah kurang masifnya penggalangan masa, stamina dan energi yang terbatas, monoton, dan tidak mengembangkan pola-pola dan model perlawanan yang lebih luas sehingga daya dorongnya lebih kuat.

Apakah penyebab mendasar atas kurang efektifnya gerakan mahasiswa?

Gerakan mahasiswa gagal untuk sekedar membangun kesadaran ekonomi -bahwa kebijakan politik kampus nyata-nyata berdampak merugikan kepentingan ekonomi mahasiswa-, apalagi membangun kesadaran politik. Gerakan mahasiswa dalam batas-batas tertentu bersifat elitis. Artinya, motor penggeraknya itu hanya komunitas kecil, minoritas kreatif. Padahal kalo ingin daya dorongnya kuat ya harus masif. Andaikata demonstrasi anti BOP mampu menggerakan sepuluh persen saja mahasiswa UGM, daya dorong yang dihasilkan akan luar biasa. Nah, sekarang demo diikuti tidak lebih dari seribu, paling-paling ratusan. Efeknya kecil, paling hanya dimuat di media setelah itu selesai.

Tawaran konkrit supaya metode gerakan menjadi efektif?

Pertama, harus membangun komunitas yang memang memiliki kesadaran politik tinggi, memiliki teknikalitas organisasi yang memadai, serta merancang organisasi yang mempu menjawab kebutuhan obyektif dan subyektifitas gerakan. Kedua, memiliki kemampuan mengorganisir massa mahasiswa secara riil hingga ke akar rumput. Ketiga, membangun jaringan pendukung seperti media, kalangan tokoh masyarakat, akademisi, sampai masyarakat politik yang memiliki kepentingan strategis yang sama. []

Arief

Suara Lain Mahasiswa

Banyak mahasiswa yang tidak mengikuti aksi-aksi yang digelar. Banyak faktor yang melatarinya. Kesibukan kuliah, perbedaan prioritas, hingga keengganan untuk terlibat dalam suatu pergerakan, menjadi pemicu.

Mahalnya biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa UGM sekarang ini bukan hanya menimbulkan perlawanan dari mahasiswa. Biaya yang demikian tinggi telah memaksa mahasiswa segera menyelesaikan kuliahnya. Hanya saja perbandingan antara keduanya sangat jauh berbeda. Banyak yang lebih memilih untuk tetap berjibaku dengan buku kuliah ketimbang berpayah-payah melakukan perlawanan. Maka, tak mengherankan apabila aksi perlawanan hanya diikuti oleh segelintir mahasiswa.

Dian Taufik, Mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2002, adalah salah satu contoh mahasiswa yang menyatakan keenggananannya untuk bergabung dengan aksi. Biaya yang mahal dan larangan orang tua untuk mengikuti aksi, terutama demontrasi, yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa, membuatnya ketakutan untuk meninggalkan kuliah. Apalagi aksi yang dilakukan, menurut mahasiswa asal Gunung Kidul ini, cenderung ke arah kekerasan. Sehingga baginya lebih baik tidak mengikuti aksi yang menolak kebijakan rektorat tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sustiwi, Mahasiswi Fak. MIPA'01. Menurutnya, bergabung dengan gerakan semacam itu tidaklah terlalu banyak memberi manfaat, bahkan sebaliknya, akan mengganggu kuliahnya. Baginya, tidak banyak hal yang bisa dilakukan. "Menurutku, kegiatan kayak gitu jelas tidak banyak manfaatnya. Mereka itu kegiatannya apa aja sih? Apa cuma dema-demo thok," ujarnya ketus. Ia mengaku tidak pernah mengikuti aksi, terutama demonstrasi, yang dilakukan di lingkungan UGM. Bahkan, ia mengaku tidak suka melihat para aktivis yang berteriak-teriak di muka umum.

Tak hanya itu, padatnya jadwal kuliah juga membuat sebagian mahasiswa kehabisan waktu untuk aktivitas di luar kuliah. Berbagai tugas praktikum maupun tugas lain sangat sulit untuk dikompromikan dengan kegiatan ekstra kampus. Hal ini dialami oleh kebanyakan mahasiswa eksakta, seperti di Fak. Kedokteran. "Masih banyak praktikum-praktikum yang harus saya selesaikan. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk bergabung dengan teman-teman gerakan," tutur Rohmad, Mahasiswa Kedokteran Umum'02.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ponco, Mahasiswa Psikologi'02. Ia justru mengaku sangat bersimpati terhadap gerakan mahasiswa yang memperjuangkan isu-isu pendidikan. "Mereka adalah mahasiswa sejati. Rasanya belum menjadi mahasiswa sejati kalau belum ikut demo," ujarnya bersemangat. Meski belum pernah terlibat dalam aksi, mahasiswa asal Cilacap ini mengaku sangat mendukung aksi mahasiswa menentang kebijakan rektor. Menurutnya, kebijakan rektor memang sangat memberatkan mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu.

Menanggapi metode aksi yang selama ini dilakukan oleh gerakan mahasiswa, Taufik menilai metode itu tidak efektif dalam merubah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak rektorat. Sama halnya dengan oleh Rohmad. Bahkan mahasiswa KU ini terlihat sangat skeptis. "Kalau sudah menjadi keputusan akan sangat sulit diubah," katanya putus asa.

Aksi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa, menurut mereka, hanya sebatas diketahui oleh orang yang kebetulan lewat saat aksi, tapi tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan rektor. Tak jauh berbeda, Sustiwi memandang aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa hanya sia-sia. "Mbok sudah. Kayak nggak ada kerjaan lain aja," ucapnya. Baginya tugas mahasiswa adalah kuliah dan kuliah.

Metode aksi juga menjadi

bersambung ke hal 16

Sebuah Refleksi Perihal Kebusukan

Judul Buku : Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik
Penulis : Zainuddin Maliki
Penerbit : Galang Press, Februari 2004
Tebal : xxxiii+273 Halaman
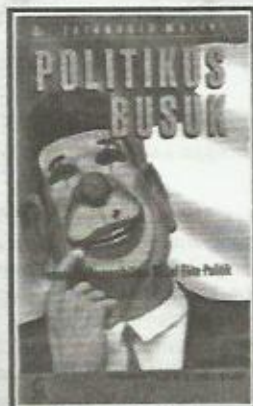
Jelang Pemilu 2004 ini, tersebutlah sebuah gerakan moral sekaligus politis. Gerakan ini menjadi menarik sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat pemilih. Intinya sederhana, sebuah ajakan untuk tak memilih para politikus yang dinilai "busuk".

Arief Budiman, seorang musuh besar Orde Baru yang terpaksa eksodus ke Australia, cukup sederhana memberikan pemahaman mengenai politikus busuk, yaitu politikus yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, pelanggaran hak azasi manusia, juga pelanggaran moral. Selafal dengan Arief, Munir, ketua Kontras, menyebut politikus busuk termasuk "politikus berdarah", yakni yang terlibat dalam tindakan kekerasan berdarah. Dan, dari Ketua Komisi Ombudsman, Antonius Sujata: politikus busuk adalah yang terlibat *money politics*, korupsi, pencandu narkoba, malas hadir di sidang parlemen, selingkuh, membuat kebijakan untuk kepentingan pribadi, suka berfoya-foya, dan melakukan tindak kejahatan lainnya.

Dalam pemilu 2004 ini, tentu kita tak ingin menjaring para pemimpin dari kuali busuk seperti berandal, tukang korup, atau seorang despot. Dengan menderetkan kriteria politikus busuk itu, kita tentu mendambakan seorang nabi. Siapa yang tak ingin negeri ini dipimpin seorang manusia sempurna? Seorang "manusia setengah dewa" kata Iwan Fals.

Buku ini berangkat dari mengamini pandangan C. Wrigtht Mills (1990) bahwa para superkuasa (orang yang sangat berkuasa-*Red.*) tengah terjangkiti penyakit yang ia sebut the higher immorality. Virus macam ini ditandai oleh konspirasi politik tingkat lanjut yang merupakan ancaman serius bagi demokrasi, juga hilangnya kepekaan moral (*moral insensibility*). Dan, penyakit para superkuasa tersebut kini telah mewabah di negeri ini.

Memang, harus ada yang mengontrol fungsi kekuasaan dalam negara. Di Indonesia, hal tersebut dimandatkan oleh warga negaranya kepada wakil rakyat di parlemen dan legislatif melalui Pemilu. Namun kenyataannya, mereka bertingkah seolah tak ada hubungan emosional dengan siapa yang diwakilinya. Sementara, kontrol kekuasaan non konvensional, yakni parlemen jalanan, atau demonstrasi adalah alternatif yang melelahkan, mahal dan penuh resiko, terutama ketika menghadapi penguasa yang tak demokratis: penguasa yang tangan kekuasaannya merasa gatal kalau tak melakukan represi.

Dalam teori-teori sosial banyak disebutkan bahwa kelangsungan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kondisi dan moralitas lapisan elitenya. Ibarat pepatah "jauh panggang dari api", komposisi elite penguasa kita jauh dari harapan. Saban hari mudah ditemukan berita yang "aneh-aneh" perihal mereka.

Buku ini menyajikan banyak analisis yang berbau akademik terhadap fenomena panggung politik negeri kita. Fokusnya adalah cacat-cacat para politikus kita. Untuk mendukung isi, disajikan juga sumber-sumber dari berbagai media cetak yang relevan. Sesungguhnya, buku ini lebih condong sebagai buah refleksi seorang pengamat atas tingkah polah para elite politik. Sebuah pengamatan dari kaca mata seorang Doktor Antropologi Politik.[]

Herulesmanasyafei

Sebuah Perjalanan Mencari Akar Konflik

Judul Buku	: Kekerasan Dan Konflik: Tantangan Bagi Demokrasi
Pengarang	: Dr. A. Munir Mulkan, dkk
Penerbit	: Forum LSM DIY
Tebal Buku	: 246+xii

Berita tanpa kesaksian langsung akan beresiko, paling tidak berita yang diterima tersebut akan berlebihan atau telah tereduksi oleh hal lain. Keduanya bukan mustahil akan semakin mengaburkan kondisi yang sebenarnya.

Konflik yang terjadi di Indonesia pada umumnya dipahami dalam dua kategori. Pertama, konflik ditempatkan sebagai suatu kejadian, peristiwa atau fakta pertikaian antar satu pihak dengan pihak lainnya. Kedua, konflik diposisikan sebagai sudut pandang/ perspektif dalam melihat peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi. Dengan menggunakan pemahaman kedua, yaitu perspektif konflik, akan mudah diketahui apakah suatu konflik itu bermakna negatif atau positif.

Mengenai pemicu terjadinya konflik di Indonesia, Gramsci menekankan adanya hegemoni kelas penguasa terhadap rakyat sebagai pangkal masalah. Hegemoni tersebut membuat pihak yang terhegemoni sadar untuk bangkit melawan. Berbeda dengan Karl Marx, menurutnya, sumber konflik terletak pada sistem penguasaan alat-alat produksi oleh pemodal terhadap buruh. Akibatnya ketika buruh tersadarkan oleh kondisi tersebut, mereka akan bangkit melawan, dan terjadilah konflik. Inilah yang coba disampaikan dalam buku bertajuk Kekerasan dan Konflik : Tantangan Bagi Demokrasi.

Bagian awal buku ini menguraikan suatu upaya untuk memahami lebih jauh akar dari suatu konflik yang dapat memberikan pemahaman lebih komperhensif pada pembaca mengenai makna dan implikasi konflik. Isu SARA sepertinya masih menjadi pemicu utama dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, di samping masalah kesenjangan sosial akibat tidak meratanya penguasaan sumber-sumber produksi.

Selanjutnya, diuraikan lebih mendalam lagi mengenai pemahaman konflik itu sendiri. Salah satu tulisan yang berjudul Konflik Sosial dan Demokratisasi (Hal 103), dengan hati-hati berusaha membaca perkembangan dinamika sosial saat ini sebagai warisan masa lalu, sehingga penanganannya akan bisa dilakukan langkah yang lebih konstruktif, yakni penguatan terhadap elemen rakyat.

Di bagian akhir, ditawarkan suatu tesis yang dibangun oleh anggapan bahwa demokrasi dijadikan jalan atau resolusi atas konflik yang berkembang karena demokrasi memungkinkan partisipasi. Uraian yang disajikan dalam bentuk kumpulan makalah ini menjelaskan bahwa dalam konflik jika yang dibutuhkan adalah sebuah pembaruan, maka yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana mewujudkan pembaruan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada, juga sebagai wahana untuk menumbuhkan saling kepercayaan diantara masyarakat. Usaha penguatan elemen rakyat, dengan demikian menjadi sangat signifikan.

Secara umum nafas dari buku ini hendak menyatakan bahwa terjadinya konflik di Indonesia disebabkan karena pemahaman yang salah terhadap akar dari konflik tersebut. Hal ini tentunya menghasilkan solusi yang tidak tepat tepat pula. Dan resolusi konflik adalah keharusan dalam menyelesaikan atau meredam konflik. Dalam lampiran, diselipkan pula panduan- panduan resolusi konflik yang sederhana serta mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sebagai media penyelesaian massalah di luar jalur pengadilan. Hingga membuat buku ini sangat tepat bagi para aktivis/pekerja lapangan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik.

Meskipun kurang lengkap memberi solusi tuntas yang nyata dalam menghadapi dari mengelola konflik, tetapi buku ini tetap menarik untuk dibaca karena setidaknya banyak memberikan konsep agar dapat mencari dan memahami akar dari sebuah konflik.

Reza

Mimpi Buruk Dunia Pendidikan Kita

Cerita tentang UGM yang kini mengalami "pasarisasi" hanyalah satu dari sekian banyak cerita muram tentang dunia pendidikan di negeri ini. Selanjutnya, pendidikan yang diskriminatif, mutu yang makin merosot, dan pendidikan yang menciptakan ketidakadilan menambah mimpi buruk dalam dunia pendidikan kita.

Setidaknya itulah yang menjadi tesis pengamat pendidikan Darmaningtyas, salah satu pembicara, dalam seminar yang digelar Sabtu pagi (1/4), sekitar pukul 09.00 WIB. Menurutnya, pendidikan kita saat ini telah memarginalkan anak-anak yang bodoh dan tidak mampu. Mereka hanya bisa bersekolah di sekolah swasta yang tidak begitu mumpuni. Alih-alih membuat manusia menjadi lebih berkeadilan dan berkemanusiaan, pendidikan justru semakin melegitimasi dan menciptakan ketidakadilan.

Lebih lanjut ia "menggugat" UU Sisdiknas yang dinilainya tidak mampu menjawab setumpuk persoalan di atas. "Jangankan menyelesaikan permasalahan yang mengemuka, UU Sisdiknas malah membebani rakyat dengan kewajiban-kewajiban menanggung keberlangsungan pendidikan," tandasnya kemudian.

Sementara itu, keberpihakan pendidikan kita terhadap rakyat kecil, sangat kurang. Sebagaimana diutarakan salah seorang pembicara lainnya, Wasingatu Zakiah, hal itu dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan bagi pendidikan di negeri ini. Anggaran pendidikan dari APBN 2004 hanya 6,8 % dari total 41 trilyun. Prosentase ini masih jauh dari harapan untuk merealisasikan anggaran 20% untuk pendidikan. Selebihnya dibebankan kepada warga negara. Implikasi yang terjadi di kemudian hari adalah beredarnya logika keliru, bahwa tidak ada pendidikan berkualitas yang murah. Jer basuki mawa bea selanjutnya menjadi apologi para birokrat kampus untuk menaikkan biaya pendidikan.

Namun pembicara lain, Sri Wahyuningsih, menawarkan perspektif yang berbeda mengenai peningkatan mutu pendidikan. Bagi Sri, transparansi dan akuntabilitas yang dipahami dan diaplikasikan secara benar, merupakan hal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ia menunjuk kasus Sekolah Kanisius sebagai contoh. Kerjasama antarpihak-pihak yang terkait yang dilandasi kerelaan, kekuatan dialog, uji gagasan, dan aksi nyata, terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Diskusi yang mengambil momentum Hari Pendidikan Nasional ini bertema "Menggugat Pendidikan". Dan diskusi ini merupakan bentuk refleksi atas dunia pendidikan Indonesia yang tengah terpuruk. "Peringatan Hardiknas, disamping isu-isu melambungnya biaya pendidikan, menjadi latar belakang diselenggrakannya seminar ini," ujar Kandar, salah seorang panitia, di sela-sela berlangsungnya acara yang digelar di Gelanggang Mahasiswa UGM itu.

Diskusi yang terselenggara atas kerjasama IDEA, APKR, LEM Fakultas Kehutanan, BINTARA dan Radar Jogja ini, juga menghadirkan tiga pembicara lain. Ketiganya yaitu, Rofiah (APKR), Hasanu Simon (Ketua Lembaga BINTARA) dan Agus Purwanto (guru) yang mengisi sesi II dalam diskusi itu.

Lewat terselenggaranya seminar ini panitia hendak mengajak masyarakat yang peduli pada pendidikan untuk merefleksikan kondisi pendidikan negeri ini. "Harapan kami dengan terselenggaranya seminar ini adalah adanya tindak lanjut dari masyarakat yang peduli pada pendidikan," tambah Kandar kemudian.

Roes

Komunitas 1001buku

Jaringan Relawan dan Pengelola Perpustakaan Anak

Ada anggapan umum bahwa tingkat minat baca orang Indonesia, termasuk anak-anak, tergolong rendah. Maka dua orang perempuan, yang menyandang gelar ibu rumah tangga, memutuskan untuk mendirikan taman bacaan non komersil di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam perjalanannya kemudian, taman bacaan tersebut mendapat sambutan yang meriah dari anak-anak. Mereka rajin datang untuk melahap buku yang ada. Akibatnya muncul satu masalah. Buku baru yang bisa dibeli oleh kedua perempuan tadi, tidak bisa mengimbangi kebutuhan anak-anak. Akhirnya, mereka kehabisan stok buku yang belum dibaca.

Ada dua hal yang bisa disimpulkan dari kondisi di atas. Yakni bahwa minat baca anak-anak ternyata sangat tinggi, dan bahwa taman bacaan yang sifatnya sosial ini perlu mendapat dukungan agar dapat mengimbangi kebutuhan pembaca, utamanya dalam hal penambahan koleksi buku.

Maka, bergabunglah perempuan ke tiga. Mereka, ke tiga perempuan itu, sepakat untuk mendirikan gerakan 1001buku, yaitu komunitas yang akan menjaring buku bacaan anak dari masyarakat untuk disalurkan ke perpustakaan anak yang ada di masyarakat.

Komunitas yang berdiri di Jakarta sejak Mei 2002 ini juga memanfatkan dunia maya (*internet*) sebagai wadah komunikasi dan perluasan ide. Mereka yang tergerak untuk bergabung hanya perlu mendaftar melalui *mailing list* (milis) untuk kemudian dapat dengan segera melakukan sesuatu di lingkungannya. Relawan yang telah terdaftar memiliki latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam.

Melalui diskusi yang intens di milis pula, beberapa relawan yang sama-sama berada di Yogyakarta sepakat untuk mendirikan 1001buku Jogja pada 16 Februari 2003. Buku-buku yang masuk ke 1001buku Jogja berasal dari masyarakat dan para penerbit buku. Namun 1001buku masih menghadapi banyak kendala dalam upaya menggalang sumbangan buku dari masyarakat.

Dalam usia yang relatif muda, tercatat berbagai kegiatan rutin yang telah dan masih akan terus dilakukan. Antara lain distribusi buku-buku sumbangan, mengajukan permohonan sumbangan buku, serta kegiatan "Dolanan Bocah dan Perpus Kaget" yang diadakan setiap Minggu Pagi di Boulevard UGM. Sayangnya kegiatan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena kebijakan Rektorat UGM. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan minat baca, serta untuk menggalang sumbangan.

Buku-buku sumbangan akan disalurkan ke perpustakaan anak yang berada dalam jaringan 1001buku Jogja. Antara lain Perpustakaan Kuncung Bawuk di Jatimulyo, Rajin Baca di Gambiran, Anak Wayang Indonesia di Pakel, Catura Pustaka di Kota Gede, Sanggar Anak Cakrawala di Gedongkiwo, dan Rumah Pelangi di Muntilan. Sebagian buku juga disalurkan ke beberapa desa melalui organisasi pemuda maupun komunitas mahasiswa.

Melalui hal yang sederhana ini, diharapkan agar 1001buku dapat memberi sumbangan kepada anak Indonesia, dan membantu mereka untuk bermimpi. Melalui buku bacaan yang bermutu, semoga terbuka wawasan anak-anak tentang dunia dengan cara yang menyenangkan. Semoga!

Elen, Pegiat Komunitas 1001buku Jogja

>>Redaksi menerima opini/artikel untuk Rubrik Ekspresi<<

Keajaiban Datang Ketika Engkau Mempercayainya

" Tuhan, aku ingin bisa menari."
(Allisa)

abieb/bal

Mimpi adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap manusia. Sebesar apapun yang dikhayalkan, akan sangat mungkin terwujud selama hal itu masih terjangkau oleh rasio. Tak peduli bagaimana kondisi pemimpi itu, asalkan mau berdo'a dan berusaha, mimpi akan menjadi nyata. Mungkin itulah pesan yang ingin disampaikan lewat operet musikal anak, yang berjudul *Shoes for Allisa*, yang digelar pada tangga 7-8 Mei 2004 di Taman Budaya Societet Militer, Yogyakarta, pukul 19.00. Acara ini merupakan hasil inisiatif Nuansa Creative & Natural School, Keluarga Muslim Psikologi, Fakultas Psikologi UGM, guna penggalangan dana bagi para penderita kanker melalui media Yayasan Kanker Indonesia (YKI).

Operet yang disutradarai oleh Arif Broto Wijayanto ini berkisah tentang kehidupan seorang gadis berusia 10 tahun yang bernama Allisa. Sejak lahir, Allisa telah menderita kanker di bagian kakinya, yang memaksanya memakai tongkat penyangga untuk berdiri dan bejalan. Ketidaksempurnaannya itu, membatasi keinginan Allisa untuk bermain bersama teman-temannya. Namun demikian, teman-teman Allisa tetap memiliki ketulusan untuk menerimanya, tanpa mempedulikan ketidaksempurnaan Allisa.

Allisa adalah seorang gadis yang selalu bermimpi untuk bisa menari. Keinginannya itu berawal ketika ia menemukan sepatu balet milik neneknya yang tak lain adalah seorang balerina. Keinginan Allisa memuncak saat melihat teman-temannya berlatih tari untuk persiapan lomba antar sekolah. Tetapi Allisa menyadari bahwa kakinya tidak dapat bergerak dengan bebas.

Ditengah keputusasaannya, Allisa bertemu seorang pelatih tari bernama Pak Budi yang membangkitkan harapannya untuk bisa menari. "Tidak Harus menjadi sempurna untuk bisa menari. Sebab, ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar mengayunkan tangan dan kakimu untuk menari. Biarkan jiwamu yang menari," ujar Pak Budi. Petuah itulah yang kemudian menguatkan tekad Allisa untuk menemukan jawaban atas mimpinya. Allisa dewasa kemudian menjadi seorang pegiat lembaga sosial bagi penyandang cacat.

Walau molor sekitar 40 menit, acara yang dimulai sekira pukul 19.40 WIB ini mampu membangkitkan antusias penonton, meski operet ini adalah pengalaman pertama bagi seluruh pemain kecuali pemeran Allisa, yang diperankan oleh Kinanti Sekar Rahina. Operet ini dimainkan oleh anak-anak dari Sanggar Tari Kembang Setaman dan SDN Ungaran Yogyakarta. Akting serta gerakan mereka yang lincah dan lentik mampu memukau penonton yang menyaksikannya.

Yang menarik, pengubahan setting panggung dilakukan, tidak dengan menutup tirai panggung maupun mematikan lampu. Namun dengan membiarkan panggung tetap terbuka, dan pemain tetap berakting. Sementara, penggantian setting panggung tetap dilakukan oleh petugas yang berpakaian ala perampok.

Acara ini juga dimeriahkan oleh Novia Kolopaking yang tampil dengan mengenakan gaun muslimah berwarna ungu. Ia membawakan lagu 'When U Believe' yang merupakan jantung dari kisah ini. Tetapi sayang, suara merdu Novia kurang didukung oleh tata suara yang bagus. "Saya tertarik mengisi acara ini karena saya melihat potensi besar yang dimiliki anak-anak di dalam dunia seni, selain itu juga karena hasil dari acara ini digunakan untuk amal," ujar Novia.

Yuliana Fitri selaku penulis skenario mengatakan bahwa dari sisi akting, koreografi; kostum, setting panggung, maupun ligthing, operet ini dirasa masih jauh dari sempurna. "Tetapi itulah yang ingin kita usung seperti pesan moral dari kisah ini bahwa kita berani untuk mewujudkan impian kita untuk menggelar operet dengan segala keterbatasannya. Selain itu, kita juga menawarkan ide cerita yang orisinal bukan adaptasi dari cerita yang sudah ada," demikian tuturnya.

Puji | Imung

Merenda Hidup Dari Buku

Lelaki setengah baya dengan rambut yang mulai beruban tampak sedang mengitari meja selutut yang penuh buku. Sesekali dia membolak-balik buku-buku bekas di depannya; memeriksa. Lelaki ini, Sunardi namanya. Ia adalah pemilik dari ratusan buku bekas yang memenuhi meja dan bak mobil pick-up miliknya. Dari tumpukan buku-buku ini, Sunardi mengayuh hidup.

Seperti biasa, terik matahari tak membuatnya beranjak menuntaskan dagangan. Untuk menghindari panas, Sunardi biasa berteduh di rerimbunan pohon di pelataran UPT Puskom di bilangan Boulevard UGM. Ia memula pekerjaannya dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore.

Buku-buku yang dijualnya amat beragam. Mulai dari buku bertemakan sastra seperti novel, cerpen, puisi, buku-buku sosial dan politik, agama, juga bermacam majalah Sunardi gelar di tempat itu. Selain buku bekas, ada pula buku baru. Semua buku-buku itu kebanyakan didapatkannya dari luar kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Malang. "Tetapi ada juga dari penerbit lokal yang menitipkan bukunya di sini," imbuhnya.

Toko buku alternatif: Mobil *pick-up* Sunardi setiap hari ramai didatangi orang-orang yang mencari buku bekas ataupun sekedar melihat-lihat. abieb/bal

Sunardi menuturkan, pekerjaan semacam ini sudah lama dilakoninya. "Sejak SMP (sekarang SLTP, *Red*) saya sudah menyambi kerja seperti ini," kenangnya mengingat saat pertama kali ia bergelut dalam bisnis ini. Awalnya, bisnis ini diperkenalkan oleh kakaknya. Namun, setelah modal yang dikumpulkan dirasa cukup, akhirnya ia memutuskan mendirikan usaha sendiri.

Sebetulnya Sunardi pernah menyimpan cita-cita untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Tetapi karena terbentur kendala, sampai sekarang angan itu belum juga tercapai. Padahal pria kelahiran 1957 ini telah berusaha mendaftar di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta, meski tak diterima. Karena biaya kuliah di perguruan tinggi swasta makin mahal, ia ter paksa mengubur cita-citanya. "Karena biaya nggak ada, jadi akhirnya saya menekuni jual beli buku ini. Lebih baik menekuni wiraswasta seperti ini," lanjutnya menghibur diri.

Sebelum berjualan di seputar UGM, Sunardi sebenarnya mempunyai sebuah kios di pusat perbukuan Shoping. Tapi karena dipikir tempatnya kurang strategis, maka ia mempunyai ide untuk berjualan keliling. Kebetulan juga, pada pertengahan tahun 90-an, ia mengikuti Gama fair. Setelah dilihat hasilnya bagus, usaha tersebut berlanjut dengan cara berjualan keliling di sekitar UGM.

Sepuluh tahun lebih Sunardi berjualan buku di UGM. Dalam kurun itu, ia sering berpindah-pindah tempat. Berawal di depan Kantor Pos, kemudian pindah ke depan Kopma UGM, setelah itu pindah lagi di Bundaran, dan sekarang di Boulevard. Ia juga tak luput dari tindakan pengusiran oleh satpam (sekarang Satuan Keamanan Kampus). Namun meski pernah diusir, Sunardi tak jera. Sebab ia berkeyakinan, usahanya sedikit banyak membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan terhadap buku.

Sunardi memang bukan apa-apa. Ia persis sebagai pedagang-pedagang lain di seputaran Boulevard yang juga mengais rezeki dari kantong mahasiswa. Bedanya, Sunardi tidak menjajakan kebutuhan perut seperti Lotek, Siomay, atau Gula-Asem. Melainkan menjajakan buku; berbisnis pengetahuan dengan harga murah.[]

Teristy

Militer di Ranah Ekonomi: Melihat Kiprah "Pengusaha Berseragam"

oleh: Anton SR. dan Hatib AK.*

Semenjak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno, intervensi militer ke pelbagai ranah kehidupan tak terbendung lagi. Kontrol militer pada lembaga-lembaga tersebut dilakukan dengan menempatkan sejumlah perwira untuk menduduki sejumlah jabatan publik. Pada masa awal Orde Baru, Soeharto menempatkan sejumlah perwira untuk menduduki sepertiga dari jabatan kementerian di kabinet, dua pertiga jabatan gubernur, lebih dari separuh jabatan bupati dan walikota, 78% jabatan direktur jendral, 34% sekretaris menteri, dan hampir separuh jabatan duta besar juga diduduki militer (Sutoro Eko, 2000:34-35). Dengan melihat dominasi militer di bidang politik pada masa itu, kita bisa memahami mengapa kemudian militer begitu mudah memasuki wilayah ekonomi negara.

Mengapa Militer Berbisnis?

Sejenak menengok kebelakang, keterlibatan tentara dalam aktivitas ekonomi dimulai sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada akhir tahun 1957. Angkatan Darat , pada waktu itu, bertindak di bawah undang-undang darurat mengambil-alih perusahaan-perusahaan seperti perkebunan, pertambangan, bank, perusahaan angkutan dan usaha-usaha lainnya. Pertamina, yang kala itu bernama Permina, adalah salah satu perusahaan yang diambil-alih militer.

Hal yang terkait dengan militer sebagai caretaker perekonomian negara terjadi pada tahun 1969. Integrasi Angkatan Bersenjata secara penuh kemudian diikuti dengan disentralisasikannya berbagai perusahaan dan yayasan yang telah didirikan di bawah koordinasi PT Tri Usaha Bhakti dari Angkatan Darat. Sentralisasi tersebut dilaksanakan demi kepentingan pembagian dana yang rasional. Pada tahun 1972 ketika Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) didirikan AD, PT Tri Usaha Bhakti segera berlindung di bawah naungan YKEP. Kelak, pada tahun 1992, yayasan ini memiliki 22 perusahaan di bawah kendali PT Tri Usaha Bhakti dan 4 perusahaan berdiri sendiri. Bidang usahanya meliputi perkayuan, perbankan, asuransi, konstruksi, penerbangan, properti, perkebunan dan industri lainnya dengan basis modal diperkirakan mencapai US$ 114 juta.

Yayasan-yayasan lain yang dimiliki militer adalah yayasan Adi Upaya yang berada di bawah naungan Angkatan Udara yang memiliki 17 perusahaan sampai tahun 1992. Selain itu, ada Yayasan Bhumymanca milik Angkatan Laut yang berdiri sejak tahun 1964, mempunyai 15 perusahaan.

Koperasi, sebagai unit bisnis yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari para anggota tentara, juga bergerak di bidang yang tidak berhubungan dengan fungsinya. Sejumlah perusahaan yang dijalankan koperasi bergerak di bidang tranportasi, kolam renang, farmasi, hotel, universitas, dan rumah sakit.

Keterlibatan tentara di bidang ekonomi juga tidak terbatas di bidang institusional saja. Di bidang non-institusional seperti program ABRI Masuk Desa (AMD), misalnya, merupakan proyek yang sering dipraktekan oleh ABRI dalam melakukan "perluasan ekonomi" di tingkat daerah. Banyaknya oknum yang menjadi backing sejumlah pengusaha (dalam hal ini, para pengusaha Tionghoa) adalah bidang lain dari bisnis militer (Indria Samego, 1998).

IRE, sebuah LSM yang gencar mengkampanyekan demiliterisasi, menjelaskan bahwa keterlibatan militer di dunia bisnis memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menjamin stabilitas ekonomi. Kedua, untuk membiayai semua kebutuhan ketentaraan yang tidak mampu dicukupi anggaran. Tujuan yang pertama hadir untuk melindungi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Sedangkan tujuan kedua digunakan untuk memperoleh sumber finansial untuk mempertahankan kekuasaannya. Selanjutnya, kegiatan militer dalam mengisi kas memunculkan fenomena "pengusaha berseragam" yang menguasai beragam bidang seperti disebut di atas.[]

* Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Pegiat LPM Dian Budaya.

>>Redaksi menerima opini/artikel untuk Rubrik Siasat<<

Aksi dan Sapu Lidi

Suatu pagi, saya melihat serombongan mahasiswa tengah berdemonstrasi. Seorang nampak berorasi sambil menenteng megaphone. "Wujudkan pendidikan murah! Tolak BOP! Tolak SPMA! Tolak SKS!" Sementara yang lain berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan poster kurang lebih berisi tuntutan yang sama. Jumlah mereka tak banyak. Sedikit malah. Nampaknya demo memang memang sudah kehilangan daya tariknya belakangan ini. Setidaknya tak seperti cerita-cerita yang dulu pernah saya dengar.

Tak tahu mengapa, tiba-tiba saja saya teringat sebuah petuah lama tentang sapu lidi. Tentu bukan berarti bahwa para demonstran itu sebaiknya berhenti demo dan kerja bakti saja, bersih-bersih dengan sapu lidi. Bukan, bukan begitu. Petuah kuno tentang sapu lidi itu mengajarkan pentingnya jumlah. Dan tentu saja persatuan.

Singkatnya begini: dengan satu batang lidi, Anda takkan bisa membersihkan halaman dari, misalnya, dedaunan yang berguguran--atau bisa juga kalau Anda bersikeras, meski akan menghabiskan waktu seharian dan ditertawakan banyak orang. Karena itu diciptakanlah sapu lidi. Artinya, Anda perlu sejumlah besar lidi. Tapi itu saja belum cukup. Anda perlu mengikatnya kuat-kuat. Atau setidaknya menyatukannya dalam genggaman. Baru Anda akan bisa membersihkan halaman dengan efektif dan efisien. Ah, kenapa pula saya bicara panjang lebar tentang sapu lidi. Toh, ini bukan tulisan "Tips dan Trik Membuat Sapu Lidi".

Baiklah, kembali ke soal demonstrasi tadi. Seperti menyapu halaman, saya rasa apapun yang dituntut para demonstran itu, termasuk pendidikan yang murah, tak akan berhasil tanpa jumlah yang besar dan ikatan yang kuat.

Jadi kita butuh dua hal di sini. Pertama, jumlah yang besar. Mari kita hitung-hitungan. Berapa banyak sih mahasiswa UGM? Tentu banyak sekali. Saya sendiri tak pernah menghitung. Tapi saya pernah mendengar jumlahnya sekira 40 ribu orang. Jumlah yang besar, bukan. Masalahnya, berapa banyak yang butuh pendidikan murah. Mungkin tidak semua. Mungkin bagi sebagian, UGM sudah cukup murah untuk mereka beli. Untuk hitung-hitungan orang goblok seperti saya, katakanlah hanya 10% yang butuh pendidikan murah, itupun masih 4 ribu orang. Itu masih jumlah yang besar.

OK, syarat pertama terpenuhi. Lalu yang kedua, ikatan yang kuat. Atau kalau kata ini kedengarannya mengganggu atau terlalu mengikat, kita bisa menggunakan istilah lain. Tindakan bersama untuk kepentingan bersama, misalnya. Paling tidak, untuk satu tujuan ini saja. Kalau itu bisa terwujud, rasanya tujuan akan lebih mudah tercapai. Paling tidak saya sudah membuktikannya untuk urusan menyapu halaman.

Ah, tapi saya lupa. Kita semua adalah mahasiswa, yang cerdas. Bukan lidi!

Penginterupsi

Si Iyik

sudut

+ Sindrom koalisi ternyata tidak hanya terjadi di panggung politik elit.
- Politikus kan juga pernah jadi mahasiswa.

+ Portal UGM memakan korban.
- Tuh kan. Pagar malah makan tanaman, eh Orang..

sambungan hal 10

salah satu alasan kenapa aksi yang dilakukan gerakan menjadi tidak efektif. Kencana Sulastihikmah tidak habis pikir dengan metode yang digunakan selama ini. "Lha gimana wong mendemo rektorat kok aksinya di Bunderan, kan lucu," ujar Mahasiswa Komunikasi'03 ini polos.

Sedikitnya mahasiswa yang terlibat dalam aksi memang belum bisa merepresentasikan seluruh mahasiswa UGM. Dari data bidang pendidikan UGM, mahasiswa UGM dari angkatan 2000-2003 berjumlah sekira 31.583 orang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan jumlah mahasiswa yang ikut aksi, baik di Bunderan maupun di lingkungan kampus. Inilah yang kemudian membuat setiap aksi tidak mendapat respon dari rektorat. "Kalau yang aksi hanya 10 sampai 50 mahasiswa tentu saja tidak akan mendapat perhatian dari rektorat," lagi Sustiwi menyatakan pendapatnya.

"Kalau yang demo hanya 20 mahasiswa, mana mungkin akan didengar oleh rektor," tambah Kencana. "Kecuali kalau demo itu diikuti oleh seluruh Fakultas atau bahkan Universitas, itu mungkin akan efektif," ungkap mahasiswi berjilbab ini serius. Ia menawarkan agar gerakan yang ada sekarang lebih menempuh bentuk-bentuk aksi yang efektif. "Lebih baik kalau bertemu langsung dengan rektor, ya semacam public hearing dengan rektor," jawabnya ketika ditanya mengenai bentuk aksi apa yang lebih baik dilakukan.

Audiensi dengan rektorat merupakan salah satu cara yang lebih efektif karena bisa langsung mengetahui latar belakang keluarnya kebijakan. "Ketua-ketua BEM kan bisa mewakili mahasiswa untuk bertatap muka langsung dengan rektor," ujar Taupik. Masih berkenaan dengan metode aksi, Rohmad menawarkan alternatif lain. Yaitu dengan mengadakan polling. Dia menganggap metode polling akan memberikan gambaran yang jelas seberapa banyak mahasiswa yang menentang kebijakan rektor. "Mungkin lebih baik teman-teman gerakan membuat polling untuk mengetahui besarnya kekuatan mahasiswa yang mendukung aksi mereka," usulnya.

Berbagai aliansi yang muncul akhir-akhir ini, lalu kemudian pecah, seakan telah menjadi kelumrahan. Perbedaan ideologi, metode aksi, bahkan visi seringkali menjadi alasan perpecahan dalam tubuh aliansi yang telah terbentuk di kemudian hari. Melihat fenomena ini, Rohmad sangat menyayangkan. "Mereka memang punya ideologi yang berbeda. Tapi untuk hal-hal yang substansial harusnya tidak ada sentimen-sentimen organisasi," ujarnya.

Tak cukup itu, kepentingan dan faktor eksistensi dan juga mungkin faktor egoisme antar pribadi para aktivis juga dianggap sebagai biang pecahnya aliansi-aliansi yang semula susah payah digalang. "Mungkin masalah kepentingan, ingin dianggap eksis, gengsi, yang menyebabkan mereka menjadi pecah," analisis Ponco, yang mengaku senang mengamati perkembangan gerakan mahasiswa. Meski tak ikut dalam aksi, baik Poco, Taufik, Rohmad, Sustiwi, maupun Kencana, berharap agar gerakan aliansi yang dibangun akan benar-benar bersatu demi kepentingan bersama.[]

Ryan, Anthony